

KEPALA DESA KARANGMALANG WETAN
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA KARANGMALANG WETAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGMALANG WETAN,

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmalang Wetan Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimaa telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimaa telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
23. Peratursn Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151)
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 5, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025))
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasadi Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 3 Seri E No.3);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 96);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56).

- 40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 45)
- 41. Peratutan Bupati Kendal Nonor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55)
- 42. Peraturan Desa Karangmalang Wetan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Karangmalang Wetan (Lembaran Desa Karangmalang Wetan No. 1 Tahun 2017);
- 43. Peraturan Desa Karangmalang Wetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Karangmalang Wetan No. 4 Tahun 2017);
- 44. Peraturan Desa Karangmalang Wetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal – usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Karangmalang Wetan Tahun 2018 No.5);
- 45. Peraturan Desa Karangmalang Wetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Tahun 2023 - 2030 (Lembaran Desa Karangmalang Wetan Tahun 2024 Nomor 03);
- 46. Peraturan Desa Karangmalang Wetan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026 Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Tahun 2025 No 5);
- 47. Peraturan Desa Karangmalang Wetan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Karangmalang Wetan Tahun 2025 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGMALANG WETAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 berjumlah **Rp. 1.156.729.745,-** (*Satu milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		Rp.	1.156.729.745
	a.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	230.686.000
	b.	Transfer	Rp.	926.043.745
	c.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	-
2.	Belanja		Rp.	1.147.513.945
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	673.341.824
	b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	216.046.200
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	192.425.921

	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	47.700.000
	e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	18.000.000
SURPLUS / (DEFISIT)			Rp.	9.215.800
3.	Pembiayaan			
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.784.200
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	15.000.000,
	Pembiayaan Netto		Rp.	(9.215.800)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

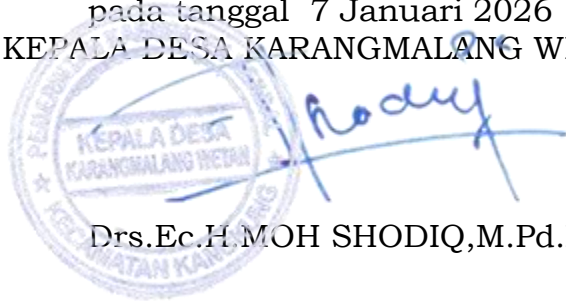
Pelaksanaan Penjabaran APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangmalang Wetan.

Ditetapkan di Karangmalang Wetan
pada tanggal 7 Januari 2026
KEPALA DESA KARANGMALANG WETAN



Drs.Ec.H.MOH SHODIQ,M.Pd.I

Diundangkan di Karangmalang Wetan
pada tanggal 7 Januari 2026
SEKRETARIS DESA KARANGMALANG WETAN,



BANAR ADENTYA PRAGASWARA

BERITA DESA KARANGMALANG WETAN TAHUN 2026 NOMOR 02

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGMALANG WETAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : AWAL

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			230.686.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			230.686.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			230.686.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			926.043.745,00	
	4.2.1.	Dana Desa			330.232.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			330.232.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			151.303.745,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			151.303.745,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			344.508.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			344.508.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			100.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			100.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.156.729.745,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			673.341.824,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			623.241.824,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	bulan	53.130.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			53.130.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			53.130.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			44.850.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			8.280.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	bulan	328.999.120,00	ADD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			328.999.120,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			328.999.120,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			277.735.120,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			51.264.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	21.925.764,00	ADD, PBH
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			21.925.764,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			21.925.764,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			438.840,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			1.316.520,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			20.170.404,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	bulan	44.347.248,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			44.347.248,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.988.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.738.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.250.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			32.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			8.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			0,00	
1.01.04.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			18.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.959.248,00	
1.01.04.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			1.959.248,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	bulan	44.557.692,00	ADD, PBH
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			44.557.692,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			44.557.692,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			43.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.90	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa			1.357.692,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12	bulan	2.250.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.250.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			270.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			630.000,00	
1.01.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.050.000,00	
1.01.06.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			1.050.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	bulan	9.532.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.532.000,00	
1.01.08.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			9.532.000,00	
1.01.08.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			9.532.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	12	bulan	18.000.000,00	PAD
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			18.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			18.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.90	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok			18.000.000,00	
1.01.92.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	12	bulan	84.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			84.000.000,00	
1.01.92.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			84.000.000,00	
1.01.92.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			84.000.000,00	
1.01.93.		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	1	paket	16.500.000,00	PAD
1.01.93.	5.1.	Belanja Pegawai			16.500.000,00	
1.01.93.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			16.500.000,00	
1.01.93.	5.1.2.91	Jasa Pengabdian bagi Perangkat Desa (yang Telah Purna)			16.500.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			50.100.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1	paket	2.700.000,00	ADD
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.700.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.700.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
1.04.91.		Pengisian Perangkat Desa	1	paket	47.400.000,00	PAD
1.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			47.400.000,00	
1.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.325.000,00	
1.04.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.000.000,00	
1.04.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
1.04.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.325.000,00	
1.04.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.400.000,00	
1.04.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.400.000,00	
1.04.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			29.675.000,00	
1.04.91.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			29.675.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			216.046.200,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			7.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	paket	7.200.000,00	DDS
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.200.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
2.01.01.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			7.200.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			80.146.200,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	1	paket	78.600.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			78.600.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			50.700.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			50.700.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			27.900.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			27.900.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	paket	1.546.200,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.546.200,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.546.200,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			346.200,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			125.000.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	1	paket	100.000.000,00	PBP
2.03.12.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			100.000.000,00	
2.03.12.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			100.000.000,00	
2.03.12.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			100.000.000,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	1	paketm	25.000.000,00	DDS
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal			25.000.000,00	
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			25.000.000,00	
2.03.15.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			10.800.000,00	
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			12.800.000,00	
2.03.15.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			400.000,00	
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			1.200.000,00	
2.05.02.		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1	paket	1.200.000,00	DDS
2.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.200.000,00	
2.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.200.000,00	
2.05.02.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			1.200.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			2.500.000,00	
2.06.03.		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1	paket	2.500.000,00	DDS
2.06.03.	5.3.	Belanja Modal			2.500.000,00	
2.06.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.500.000,00	
2.06.03.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			2.500.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			192.425.921,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			24.036.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	paket	24.036.000,00	DDS, PAD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.036.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			24.036.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			24.036.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			139.539.921,00	
3.03.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	1	paket	135.539.921,00	DDS, PBH
3.03.05.	5.3.	Belanja Modal			135.539.921,00	
3.03.05.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			135.539.921,00	
3.03.05.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			4.000.000,00	
3.03.05.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			58.539.921,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.05.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			68.250.000,00	
3.03.05.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			4.000.000,00	
3.03.05.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			750.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	paket	4.000.000,00	PAD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			4.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			28.850.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	paket	2.250.000,00	PAD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.250.000,00	
3.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.250.000,00	
3.04.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.250.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	paket	25.000.000,00	PAD
3.04.03.	5.3.	Belanja Modal			25.000.000,00	
3.04.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			25.000.000,00	
3.04.03.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			25.000.000,00	
3.04.91.		Pembinaan dan Operasional KPMD	1	paket	1.600.000,00	PAD
3.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.600.000,00	
3.04.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.600.000,00	
3.04.91.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.600.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			47.700.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			12.700.000,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	paket	12.700.000,00	DDS
4.02.04.	5.3.	Belanja Modal			12.700.000,00	
4.02.04.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			12.700.000,00	
4.02.04.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.04.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			12.000.000,00	DDS
4.02.04.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			100.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			35.000.000,00	
4.05.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1	unit	35.000.000,00	
4.05.02.	5.3.	Belanja Modal			35.000.000,00	
4.05.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			35.000.000,00	
4.05.02.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00	
4.05.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			4.000.000,00	
4.05.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			27.000.000,00	
4.05.02.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			2.100.000,00	
4.05.02.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			400.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			18.000.000,00	DDS
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			18.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	12	bulan	18.000.000,00	
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			18.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			18.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.147.513.945,00	
		SURPLUS DEFISIT			9.215.800,00	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			5.784.200,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			5.784.200,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			5.784.200,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			15.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			15.000.000,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		PEMBIAYAAN NETTO			9.215.800,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



Karangmalang Wetan, 7 January 2026

Kepala Desa

MOH SHODIQ